

**PETUNJUK PENGARAH SURAT
TENTANG SINGKATAN ARAHAN SURAT SERTA PENOMORAN
KEPUTUSAN YANG DITANDA TANGANI UNIT PENGOLAH A.N. KBPN**

KLASIFIKASI ESELON I

- 100 SEKRETARIAT UTAMA
- 200 DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN
- 300 DEPUTI BIDANG HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH
- 400 DEPUTI BIDANG PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN
- 500 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PERTANAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- 600 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN
KONFLIK PERTANAHAN
- 700 INSPEKTORAT UTAMA
- 800 SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL (STPN)

KLASIFIKASI ...

KLASIFIKASI ESELON II

100 SEKRETARIAT UTAMA (SETTAMA)

- 1 Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
- 2 Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran
- 3 Biro Organisasi dan Kepegawaian
- 4 Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
- 5 Biro Umum
- 6 Pusat Data dan Informasi Pertanahan
- 7 Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat
- 8 Pusat Penelitian dan Pengembangan
- 9 Pusat Pendidikan dan Pelatihan

200 DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN (DEPUTI I)

- 10 Direktorat Pengukuran Dasar
- 11 Direktorat Pemetaan Dasar
- 12 Direktorat Pemetaan Tematik
- 13 Direktorat Survei Potensi Tanah

300 DEPUTI BIDANG HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH (DEPUTI II)

- 14 Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah
- 15 Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah
- 16 Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang
- 17 Direktorat Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang

400 DEPUTI BIDANG PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN (DEPUTI III)

- 18 Direktorat Penatagunaan Tanah
- 19 Direktorat Landreform
- 20 Direktorat Konsolidasi Tanah
- 21 Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

500 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PERTANAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DEPUTI IV)

- 22 Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program
- 23 Direktorat Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis
- 24 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

600 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN (DEPUTI V)

- 25 Direktorat Konflik Pertanahan
- 26 Direktorat Sengketa Pertanahan
- 27 Direktorat Perkara Pertanahan

700 INSPEKTORAT UTAMA (ITTAMA)

- 28 Bagian Tata Usaha
- 29 Inspektorat Wilayah I
- 30 Inspektorat Wilayah II
- 31 Inspektorat Wilayah III
- 32 Inspektorat Wilayah IV
- 33 Inspektorat Wilayah V

800 SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL (STPN)

KLASIFIKASI ...

KLASIFIKASI ESELON III

100 SEKRETARIAT UTAMA

1 Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

- 1.1 Bagian Perencanaan Progran dan Anggaran Pusat
- 1.2 Bagian Perencanaan dan Progran Anggaran Wilayah
- 1.3 Bagian Kerjasama Luar Negeri
- 1.4 Bagian Pemantauan dan Evaluasi

2 Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran

- 2.1 Bagian Anggaran dan Penerimaan
- 2.2 Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan
- 2.3 Bagian Akuntansi dan Pelaporan

3 Biro Organisasi dan Kepegawaian

3.1 Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing ditambah Nomor Kode Pembantu:

- 1 Disiplin
- 2 DUK
- 3 Karpeg
- 4 Daftar Keluarga (Karis, Karsu, Laporan Kelahiran)
- 5 Perceraian
- 6 DP3
- 7 Taspen
- 8 Daftar Riwayat Pekerjaan (Perubahan NIP, Nama, Tempat Tanggal Lahir)
- 9 Satya Lencana
- 10 Askes
- 11 Tanda Pengenal/Seragam
- 12 Korps Pegawai
- 13 Kepartaian Politik/Legislatif

3.2 Bagian Pengembangan Kepegawaian

Masing-masing ditambah Nomor Kode Pembantu:

- 1 Pengangkatan CPNS
- 2 LPJ (Latihan Pra Jabatan)
- 3 Pendidikan Reguler/Kursus-kursus
- 4 Pendidikan Non Reguler/Penjurangan
- 5 Pendidikan Dalam Negeri
- 6 Pendidikan Luar Negeri
- 7 Tenaga Pengajar/Widyaiswara
- 8 Pencantuman Gelar/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)
- 9 Ujian Dinas
- 10 Pemberhentian dan Penempatan Kembali Pegawai Tugas Belajar
- 11 Jabatan Struktural
- 12 Jabatan Fungsional
- 13 Honorer

3.3 Bagian ...

3.3 Bagian Mutasi Kepegawaian

- 1 Mutasi Wilayah I
 - 2 Mutasi Wilayah II
 - 3 Mutasi Wilayah III
- } hanya digunakan untuk masalah kenaikan pangkat

Masing-masing ditambah Nomor Kode Pembantu:

- 1 Pengangkatan CPNS menjadi PNS
- 2 Kenaikan Pangkat
- 3 Mutasi Kerja
- 4 Pemberhentian dan Pensiun
- 5 Pengambilan Sumpah /Janji
- 6 Kenaikan Gaji Berkala
- 7 Cuti
- 8 Pengangkatan dalam Jabatan dan Mutasi
- 9 Lolos butuh (Mutasi ke Instansi lain)

3.4 Bagian Organisasi dan Tata Laksana

- 1 Kelembagaan
- 2 Tatalaksana
- 3 Analisis Jabatan

4 Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

- 4.1 Bagian Tata Usaha Pimpinan
- 4.2 Bagian Keamanan
- 4.3 Bagian Protokol

5 Biro Umum

- 5.1 Bagian Persuratan dan Kearsipan
 - 1 Persuratan
 - 2 Penggandaan
 - 3 Kearsipan
- 5.2 Bagian Rumah Tangga
 - 1 Kendaraan dan Perjalanan Dinas
 - 2 Urusan dalam
 - 3 Urusan Gaji
- 5.3 Bagian Perlengkapan
 - 1 Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2 Sarana dan Prasarana
- 5.4 Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara
 - 1 Inventarisasi dan Pelaporan
 - 2 Penertiban dan Penggunaan Aset

6 Pusat Data dan Informasi Pertanahan

- 6.1 Bidang Pengembangan Sistem, Data, dan Informasi Pertanahan
- 6.2 Bidang Bimbingan dan Penerapan Komputerisasi Simtanah

7 Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat

- 7.1 Bidang Perundang-undangan
- 7.2 Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum
- 7.3 Bidang Hubungan Masyarakat

- 8 Pusat Penelitian dan Pengembangan**
 - 8.1 Bidang Kajian Kebijakan
 - 8.2 Bidang Kajian Pelayanan

- 9 Pusat Pendidikan dan Pelatihan**
 - 9.1 Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
 - 9.2 Bidang Penyelenggaraan

- 200 DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN (DEPUTI I)**
- 10 Direktorat Pengukuran Dasar**
 - 10.1 Sub Direktorat Program dan Kendali Mutu
 - 10.2 Sub Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kerangka Dasar
 - 10.3 Sub Direktorat Pengukuran Kawasan dan Wilayah

- 11 Direktorat Pemetaan Dasar**
 - 11.1 Sub Direktorat Terestris dan Citra Penginderaan Jauh
 - 11.2 Sub Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perairan
 - 11.3 Sub Direktorat Wilayah Administrasi, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu

- 12 Direktorat Pemetaan Tematik**
 - 12.1 Sub Direktorat Tematik Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - 12.2 Sub Direktorat Tematik Kawasan
 - 12.3 Sub Direktorat Tematik Wilayah Khusus

- 13 Direktorat Survei Potensi Tanah**
 - 13.1 Sub Direktorat Penilaian Bidang Tanah
 - 13.2 Sub Direktorat Penilaian Tanah Kawasan
 - 13.3 Sub Direktorat Pengembangan Penilaian Tanah

- 300 Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Deputi II)**
- 14 Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah**
 - 14.1 Sub Direktorat Pengaturan dan Evaluasi Hak Tanah
 - 14.2 Sub Direktorat Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
 - 1 Hak Milik
 - 2 Hak Guna Bangunan
 - 3 Hak Pakai
 - 4 P3MB (Penertiban, Pengurusan, Peninggalan Milik Belanda)
 - 5 Kedutaan
 - 14.3 Hak Guna Usaha

- 15 Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah**
 - 15.1 Sub Direktorat Pengaturan Pengadaan Tanah
 - 15.2 Sub Direktorat Pengelolaan Tanah
 - 15.3 Sub Direktorat Penetapan Hak Tanah

16 Direktorat ...

- 16** **Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang**
 - 16.1 Sub Direktorat Batas Bidang Tanah
 - 16.2 Sub Direktorat Batas Ruang dan Perairan
 - 16.3 Sub Direktorat Sistem Informasi Bidang Tanah

- 17** **Direktorat Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang**
 - 17.1 Sub Direktorat Pendaftaran Hak
 - 17.2 Sub Direktorat Pendaftaran Hak Guna Ruang dan Perairan
 - 17.3 Sub Direktorat Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT

- 400** **Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Deputi III)**
- 18** **Direktorat Penatagunaan Tanah**
 - 18.1 Sub Direktorat Perencanaan Penatagunaan Tanah
 - 18.2 Sub Direktorat Pengelolaan Ketersediaan Tanah
 - 18.3 Sub Direktorat Pemeliharaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- 19** **Direktorat Landreform**
 - 19.1 Sub Direktorat Penguasaan Tanah Objek Landreform dan Ganti Kerugian
 - 19.2 Sub Direktorat Redistribusi dan Pemanfaatan Bersama
 - 19.3 Sub Direktorat Inventarisasi dan Basis Data Landreform

- 20** **Direktorat Konsolidasi Tanah**
 - 20.1 Sub Direktorat Penyediaan Tanah
 - 20.2 Sub Direktorat Penataan Tanah Bersama
 - 20.3 Sub Direktorat Promosi, Pengembangan dan Kerjasama

- 21** **Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu**
 - 21.1 Sub Direktorat Penyiapan Program dan Zonasi
 - 21.2 Sub Direktorat Penataan Kawasan
 - 21.3 Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan

- 500** **Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat (Deputi IV)**
- 22** **Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program**
 - 22.1 Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan Pertanahan
 - 22.2 Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Program Pertanahan
 - 22.3 Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Sektorial

- 23** **Direktorat Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis**
 - 23.1 Sub Direktorat Pengelolaan Tanah Negara Bebas dan Bekas Kawasan
 - 23.2 Sub Direktorat Pengelolaan Tanah Negara Bekas Hak
 - 23.3 Sub Direktorat Pengelolaan Tanah Terlantar
 - 23.4 Sub Direktorat Pengelolaan Tanah Kritis

- 24** **Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan**
 - 24.1 Sub Direktorat Fasilitasi
 - 24.2 Sub Direktorat Kerjasama Pemberdayaan
 - 24.3 Sub Direktorat Bina Partisipasi

- 600** **Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Deputi V)**
 - 25** **Direktorat Konflik Pertanahan**
 - 25.1 Sub Direktorat Konflik Lembaga
 - 25.2 Sub Direktorat Konflik Kelompok Masyarakat
 - 25.3 Sub Direktorat Konflik Masyarakat dengan Badan Hukum

 - 26** **Direktorat Sengketa Pertanahan**
 - 26.1 Sub Direktorat Sengketa Yuridis
 - 26.2 Sub Direktorat Sengketa Fisik
 - 26.3 Sub Direktorat Sengketa Landreform

 - 27** **Direktorat Perkara Pertanahan**
 - 27.1 Sub Direktorat Perkara Wilayah I
 - 27.2 Sub Direktorat Perkara Wilayah II
 - 27.3 Sub Direktorat Perkara Wilayah III

- 700** **Inspektorat Utama**
 - 28** **Bagian Tata Usaha**
 - 29** **Wilayah I**
 - 30** **Wilayah II**
 - 31** **Wilayah III**
 - 32** **Wilayah IV**
 - 33** **Wilayah V**

RINCIAN ...

RINCIAN KEGIATAN MASING-MASING MASALAH

000 UMUM

- 001 Hari Besar
- 002 Undangan
- 003 Narasumber/Pembicara
- 004 Staf Khusus
- 005 Komite
- 006 Audience
- 007 Rahasia Kepala BPN
- 008 Tim/Panitia/Kelompok Kerja
- 009 Alamat Kantor
- 010 Perjalanan Dinas Kepala BPN ke luar negeri
- 011 Perjalanan Dinas Pegawai ke luar negeri
- 012 Studi Banding
- 013 Kunjungan
- 014 Riset/Penelitian/Survey
- 015 Seminar/Workshop/Lokakarya/Rapat Kerja
- 016 Pengaduan
- 017 Laporan
- 018 Bencana Alam
- 019 Pemberitahuan
- 020 Hubungan Antara Lembaga/Instansi
- 021 SPOPP
- 022 Saksi
- 023 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- 024 Lain-lain

KODE ...

KODE WILAYAH PROVINSI

10	PUSAT
11	PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
12	PROVINSI SUMATERA UTARA
13	PROVINSI SUMATERA BARAT
14	PROVINSI RIAU
15	PROVINSI JAMBI
16	PROVINSI SUMATERA SELATAN
17	PROVINSI BENGKULU
18	PROVINSI LAMPUNG
19	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
21	PROVINSI KEPULAUAN RIAU
31	D.K.I. JAKARTA
32	PROVINSI JAWA BARAT
33	PROVINSI JAWA TENGAH
34	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
35	PROVINSI JAWA TIMUR
36	PROVINSI BANTEN
51	PROVINSI BALI
52	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
53	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
61	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
62	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
63	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
64	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
71	PROVINSI SULAWESI UTARA
72	PROVINSI SULAWESI TENGAH
73	PROVINSI SULAWESI SELATAN
74	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
75	PROVINSI GORONTALO
76	PROVINSI SULAWESI BARAT
81	PROVINSI MALUKU
82	PROVINSI MALUKU UTARA
91	PROVINSI PAPUA
92	PROVINSI PAPUA BARAT

KANTOR ...

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

100 Bagian Tata Usaha

- 1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 2 Sub Bagian Kepegawaian
- 3 Sub Bagian Umum dan Informasi

200 Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan

- 4 Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar
- 5 Seksi Pemetaan Tematik
- 6 Seksi Pengukuran Bidang
- 7 Seksi Survei Potensi Tanah

300 Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

- 8 Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan
- 9 Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum
- 10 Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
- 11 Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

400 Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan

- 12 Seksi Penatagunaan Tanah
- 13 Seksi Penataan Kawasan tertentu
- 14 Seksi Landreform
- 15 Seksi Konsolidasi tanah

500 Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 16 Seksi Pengendalian Pertanahan
- 17 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

600 Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik pertanahan

- 18 Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
- 19 Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan

KANTOR ...

KANTOR PERTANAHAN

100 Sub Bagian Tata Usaha

- 1 Urusan Perencanaan dan Keuangan
- 2 Urusan Umum dan Kepegawaian

200 Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

- 3 Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan
- 4 Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah

300 Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

- 5 Sub Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan
- 6 Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
- 7 Sub Seksi Pendaftaran Hak
- 8 Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT

400 Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan

- 9 Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
- 10 Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

500 Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

- 11 Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
- 12 Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat

600 Seksi Konflik, Sengketa, dan Perkara

- 13 Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
- 14 Sub Seksi Perkara Pertanahan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

JOYO WINOTO, Ph.D